



Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film di Media Sosial Telegram Dalam Perspektif Hukum Pidana

Firda Alfionita Saputri*, Ahmad Suryono

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Hukum yang ada sering dilanggar dengan beragam macam bentuk di bidang perdata atau pidana, apalagi di era globalisasi ini maka hukum harus seimbang dengan kemajuan zaman salah satu contohnya yaitu adanya penyebaran full video film di aplikasi Telegram. Berkaitan dengan masalah tersebut maka diperlukan suatu upaya dari berbagai pihak dalam memperkuat perlindungan pemegang hak cipta di era digital. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta akibat penyebaran full video film di media sosial Telegram dalam perspektif hukum pidana. Pembahasan penelitian ini yaitu perlindungan hukum atas Film Gadis Kretek yang di unggah pada Telegram perlu dilakukan. Pemegang hak cipta perlu dilindungi dengan adanya perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk upaya preventif yaitu penutupan konten dan/hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik. Bentuk upaya represif yaitu bentuk perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang lebih ditunjukkan apabila telah terjadi penyelesaian sengketa. Dampak dari platform ilegal yang beredar di Telegram ini maka Kominfo perlu memberikan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak cipta di platform digital terkait telegram yang terdaftar sebagai PSE asing di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Film Gadis Kretek yang disebarluaskan pada grup Telegram dengan Lk21 dan rebahin.net membuat pemegang hak cipta perlu adanya perlindungan dengan perlindungan hukum preventif dan represif dari pelanggaran hak cipta penyebaran film pada Telegram.

Kata Kunci: Karya Cipta Film, Telegram, Hukum Hak Cipta Film, Film Gadis Kretek

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3017>

*Correspondence: Firda Alfionita Saputri

Email: firdaalfionita78@gmail.com

Received: 15-09-2024

Accepted: 19-09-2024

Published: 26-09-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Existing laws are often violated in various forms in the civil or criminal fields, especially in this era of globalization, the law must be balanced with the progress of the times, one example of which is the distribution of full video films on the Telegram application. In connection with this problem, efforts are needed from various parties to strengthen the protection of copyright holders in the digital era. The purpose of this research is to describe legal protection for copyright holders due to the distribution of full video films on Telegram social media from a criminal law perspective. The discussion of this research is that legal protection for the film *Kretek Girl* which is uploaded on Telegram needs to be carried out. Copyright holders need to be protected with preventive and repressive legal protection. A form of preventive effort is the closure of content and/user access rights that violate Copyright and/or related rights in electronic systems. The form of repressive efforts is the final form of protection in the form of fines, imprisonment and additional penalties which are more indicated if a dispute resolution has occurred. The impact of this illegal platform circulating on Telegram is that Kominfo needs to provide special regulations governing copyright protection on digital platforms related to Telegram which are registered as foreign PSEs in Indonesia. The conclusion of this

research is that the film *Kretek Girl*, which was distributed on the Telegram group with Lk21 and rebahin.net, means that copyright holders need protection with preventive and repressive legal protection from copyright infringement by distributing films on Telegram.

Keywords: Film Copyright Works, Telegram, Film Copyright Law, Film *Kretek Girl*

Pendahuluan

Hukum yang ada sering dilanggar dengan berbagai macam bentuk di bidang perdata atau pidana, apalagi pada saat ini dimana era globalisasi saat ini membuat hukum harus mengimbangi kemajuan zaman (Mandonza, 2022). Dunia film termasuk dalam kekayaan intelektual dalam industri perfilman, dimana kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak eksklusif bagi creator, inventor maupun pendesain dari karya cipta yang memiliki nilai komersial dengan pendaftaran di instansi sebagai penghargaan maupun pengakuan hak yang layak memperoleh fasilitas perlindungan dari negara (Khairina, 2020). Pada era berkembangnya teknologi saat ini juga memberikan dampak yang negatif bagi suatu karya cipta salah satunya di dunia industri film, hingga terjadi suatu tindakan negatif yaitu penyebaran full video film di aplikasi Telegram. Dampak dari tindakan tersebut adalah Pemegang hak cipta kehilangan pendapatan dari hasil penjualan film karena film dapat diakses secara gratis di Telegram. Dampak dari hal tersebut adalah sangat merugikan pemilik atau pemegang hak cipta suatu film atas ciptaannya karena karyanya disalahgunakan dan disebarluaskan tanpa izin. Salah satu contoh penyebaran full video film pada telegram yang sedang marak adalah Film *Gadis Kretek*. Film ini telah ditemukan pada grup telegram dengan nama LK21, rebahin.net, bioskop XXI yang sengaja menyebarluaskan Film *Gadis Kretek* dalam bentuk HD, rekaman maupun hanya berupa potongan film secara sengaja. Pada penelitian kali ini bahwa Telegram terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam lingkup privat di Indonesia dan Telegram termasuk kategori PSE asing sehingga sulit untuk menjangkau dan menuntut platform ini. Dalam hal ini pengguna Telegram dapat dengan mudah menyembunyikan identitas mereka, sehingga sulit untuk melacak dan menindak pelanggar. Dampaknya pengguna Telegram tidak mempunyai kepastian hukum karena platform ini tidak terdaftar di Indonesia (Ritonga et al., 2023). Pemegang Hak Cipta mempunyai hak untuk melindungi karyanya dari pelanggaran seperti penyebaran full video film pada telegram. Sehingga perlu adanya upaya dari berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan pemegang hak cipta di era digital. Berdasarkan hal di atas maka pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan hak cipta di era digital dan diperlukan kerjasama antara pemerintah, platform digital, dan penegang hak cipta untuk memastikan perlindungan hak cipta yang efektif. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mendeskripsikan perlindungan

hukum terhadap pemegang hak cipta akibat penyebaran full video film di media sosial telegram dalam perspektif hukum pidana(Habibie et al., 2023).

Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan dua pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian kali ini. Selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang mana jenis pendekatan menjelaskan bahwasanya pendekatan ini juga beranjak dari pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam lingkup ilmu hukum(Setyorini et al., 2023). Selain itu pendekatan konseptual ini juga termasuk dalam pemberian suatu sudut pandang dari penganalisaan suatu fokus permasalahan dalam penelitian yang dilihat ditinjau berdasarkan beberapa aspek dan konsep hukum yang melatarbelakanginya, bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan dari peraturan yang berkaitan, jenis pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) ini seringkali digunakan untuk memahami konsep-konsep dalam penormaan di perundang-undangan(Nuryaningsih, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film Di Media Sosial Telegram Dalam Perspektif Hukum Pidana

Zaman sekarang penyebaran informasi sangat mudah untuk dilakukan dan sangat cepat menyebar ke masyarakat luas. Penyebaran ini dapat menjadi sebuah peluang baru untuk melakukan tindakan pelanggaran hak cipta, khususnya pelanggaran Pembajakan karya sinematografi(Sabillah, 2022). Pembajakan yaitu suatu perilaku mencuri karya secara ilegal melalui pengumpulan rekaman lagu yang mempunyai hak cipta lalu dipasarkan yang juga diperbanyak tanpa izin dari pencipta. Pelanggaran ini juga disebut album seleksi atau ketikan. Pembajakan karya sinematografi sering dilakukan pada *platform* media sosial, terutama pada *platform* telegram. Telegram menjadi *platform* yang sangat populer untuk menyebarkan film bajakan. Film Gadis Kretek yaitu salah satu film yang disebarluaskan melalui media sosial Telegram merupakan film hasil Produksi oleh BASE Entertainment dan Fourcolour Film pada Tahun 2023. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada undang-undang Nomor 33 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2009 Tentang perfilman, film adalah karya seni budaya yang pranata sosial media dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan(Lestari et al., 2023).

Penelitian ini akan membahas mengenai film Gadis Kretek yang disebarluaskan pada aplikasi Telegram, sebagai berikut :

Film Gadis Kretek yaitu serial web Indonesia tahun 2023 yang ditayangkan di Netflix diadaptasikan dari novel yang disutradarai Kamila Andini dan Ifa Infansyah, serta di perankan oleh Dian Sastrowardoyo, Ario Bayu, Arya Saloka dan Putri Mariono. Film ini rilis pada tanggal 6 November 2023(Pamungkas, 2023). Menurut Pasal 63, waktu perlindungan yang diberikan selama 50 Tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan, artinya bahwa film Gadis Kretek mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali di rilis(Lestari et al., 2023).

Pembahasan penelitian ini aplikasi Netflix merupakan Pemegang Hak Cipta dalam Program komputer, yang telah diatur ketentuannya di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta(Misbah, 2024). Netflix merupakan aplikasi yang berbayar oleh karena itu, banyak pelanggar dengan sengaja memanfaatkan ini untuk sengaja membeli satu akun Netflix dan melakukan pembajakan film serta melakukan pencurian dengan cara menyalin atau merekam film dari aplikasi Telegram yang sedang digemari oleh para kalangan muda maupun orang dewasa yang ingin menonton film secara ilegal dan gratis(Yuba, 2022).

Penyebaran full video pada aplikasi Telegram ini ditemukan di suatu grup untuk menyebarkan film Gadis Kretek pada aplikasi Telegram dengan nama LK21, rebahin.net, bioskop XX1 yang sengaja menyebarkan film ini dalam bentuk HD, rekaman, ataupun hanya potongan film Gadis Kretek secara sengaja meskipun sudah seringkali dilakukan pemblokiran oleh pemerintah. Pengguna Telegram atau para pelanggar tersebut berganti username grup chat sehingga masih bebas di akses. Perlindungan pemegang hak cipta dalam penelitian ini yaitu hak eksklusif sesuai dengan pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis dengan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata dengan tidak mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Hak eksklusif ini meliputi hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dimiliki oleh pemilik hak cipta yang digunakan untuk memperoleh utilitas ekonomi dari suatu karya yang telah dibuat(Aziz, 2021). Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu ciptaan adalah keterkaitan antarapencipta dengan karyanya yang harus dihargai dengan maksud bahwa pencipta atauun penerima hak eksklusif agar memberikan pengumuman maupun memperbanyak karyanya ataupun memberi izin tetapi tidak mengurangi batasan menurun perundangan yang berlaku(Islamiah, 2023).

Pencipta dianggap sebagai Pemegang hak cipta yang diatur dalam Pasal 31 sampai Pasal 34. Pemegang Hak Cipta merupakan pencipta yang disebut pemilik hak cipta maupun pihak yang akan menerima hak secara sah(Alfalalah & Anshori, 2020). Sedangkan ciptaan yaitu hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran(Darmawan, 2019), imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian

yang dieskpresikan dalam bentuk nyata. Pada Film Gadis Kretek ini hak eksklusif dimiliki oleh BASE Entertainment dan fourcolour Films dan Netflix. Film Gadis kretek ini disebarluaskan oleh pelanggar yang tidak bertanggung jawab melalui grup-grup pada Telegram. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar tersebut terhadap hak ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, pelanggar tersebut tidak mempunyai izin terhadap hak ekonomi yang dimiliki seorang pencipta dan pemegang hak cipta yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta(Yuba, 2022).

Pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa Telegram termasuk aplikasi yang sering digunakan sebagai modus kejahatan pelanggaran hak cipta(Nuryanah et al., 2021). Adanya fitur-fitur dan kelebihan/keunggulan pada telegram hal ini memudahkan para pengguna untuk menyebarluaskan film secara luas kepada masyarakat dengan waktu yang singkat(Hartanto & Tumimomor, 2024). Telegram merupakan *platform* media sosial yang populer dan telah menjadi salah satu sarana utama dugaan pelanggaran hak cipta(Pamungkas, 2023). Menurut Kominfo bahwa telegram termasuk *platform* yang masih belum terdaftar sebagai Badan Hukum di Indonesia. Teelegram menjadi salah satu aplikasi yang termasuk di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam lingkup privat, sehingga telegram disebut sebagai PSE Asing. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Asing merupakan orang, badan usaha, atau lembaga yang berada diluar wilayah Indonesia dan menyediakan layanan sistem elektronik melalui internet atau jaringan elektronik yang dapat diakses oleh publik Indonesia(Putra & Hartati, 2023). Telegram termasuk golongan PSE Asing privat yang hanya menyediakan layanan sistem elektronik untuk keperluan pribadi, kelompok atau badan usaha yang sifatnya komersial ataupun non-komersial. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di atur dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat(Lestari et al., 2023).

Pembahasan penelitian ini pemegang hak cipta berhak mendapatkan perlindungan hukum atas Film Gadis Kretek yang di unggah pada Telegram. Pemegang hak cipta perlu dilindungi dengan adanya perlindungan hukum preventif dan respresif(Handayani et al., 2022) . Adapun upaya preventif adalah hukum yang ditunjukkan untuk mencegah perselisihan. Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu penutupan konten hak akses pengguna yang melanggar hak ipta atau hak terkait dalam sistem elektronik(Flayembun et al., 2022). Upaya Respresif yaitu bentuk perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang lebih ditunjukkan apabila telah terjadi penyelesaian sengketa. Pemegang Hak cipta perlu melakukan dengan mengajukan tuntutan tindak pidana kepada pelanggar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda ataupun kurungan. Sebagaimana yang telah

diuraikan pada BAB II bahwa pelanggaran hak cipta dijelaskan pada Pasal 112 hingga 123 Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Rastati, 2022).

Terkait dengan topik penelitian, pemegang hak cipta dapat menuntut pelanggar dengan pasal 113 ayat (4) undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak 4.000.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada pelanggar yang menyebarkan full video film Gadis Kretek pada Telegram (Anjani & Yusuf, 2022). Netflix sebagai Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan tuntutan tindak pidana delik aduan karena merasa dirugikan atas karyanya sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang Hak cipta merupakan delik aduan, sehingga pelaku hanya dapat dituntut apabila pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan (Maulidania, 2024). Pihak Telegram dapat dituntut dengan kualifikasi turut serta dalam tindak pidana sesuai dengan Pasal 55 KUHP ayat (1) hal ini jika terbukti secara hukum bahwa telegram telah membiarkan atau tidak mengambil tindakan untuk mencegah atau menghentikan tindak pidana tersebut. Penentuan turut serta dalam kasus tindak pidana ini harus dilakukan berdasarkan bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa Telegram sengaja membiarkan tindak pidana terjadi pada platformnya (Rastati, 2022).

Proses hukum pidana mempunyai dasar hukum pada Pasal 109 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: " hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/ atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana" (Salsabila & Diera, 2022). Pemegang hak cipta merasa dirugikan oleh pelanggar yang melakukan pembajakan film pada *platform* Telegram dengan tanpa izin terdahulu, pemegang hak cipta dapat mengajukan delik aduan atas tindak pidana ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang bekerja sama dengan kepolisian berdasarkan yang tercantum dalam pasal 120 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengenai pemberlakuan atas delik aduan dari pemegang hak cipta film Gadis Kretek (Yuba, 2022).

Munculnya suatu pelanggaran hak cipta melalui pembajakan film pada telegram merupakan peristiwa kompleks yang berdampak negatif bagi pemegang hak cipta. Menghargai dan menghormati hak cipta serta mendukung industri film legal merupakan tujuan utama dalam menjaga ketetapan karya film serta menjadikan perfilman di Indonesia semakin meningkat (Ajibulloh & Yudhistira, 2024). Pemerintah perlu melakukan regulasi terkait perlindungan hak cipta di era digital dan perlu kerja sama antara pemerintahan, *platform* digital dan pemegang hak cipta untuk memastikan perlindungan hak cipta yang efektif. Hal ini pemerintah perlu adanya regulasi diantaranya yaitu (Islamiah, 2023):

1. Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di era digital pada saat ini.

2. Perlu adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menindaklanjuti pelanggaran hak cipta pada film.
3. Pemerintah perlu mengadakan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak cipta film dan pentingnya menghargai karya orang lain (Darman et al., 2024).

Terciptanya regulasi tersebut maka dapat membantu dan memastikan bahwa pencipta film dapat terlindungi dari pembajakan film (Afdhaniar, 2021). Pencipta film mendapatkan imbalan yang adil atas karyanya agar pencipta film terus berkarya dan menghasilkan film-film baru yang inovatif dan berkualitas serta dapat memajukan industri film di Indonesia. Dampak dari *platform* ilegal yang beredar di Indonesia seperti telegram ini maka kominfo memerlukan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak cipta di *platform* digital terkait telegram yang terdaftar sebagai PSE asing di Indonesia. Saat ini kominfo telah melayangkan surat teguran pada pihak Telegram dan mengancam akan memblokir atau memutus akses pada situs Telegram dikarenakan Telegram tidak kooperatif terhadap tindakan kejahatan yang ada di Indonesia (Sabillah, 2022).

Pembahasan tersebut menimbulkan suatu kekosongan hukum atau kesenjangan hukum pada pelanggaran hak cipta, karena belum adanya undang-undang yang mengatur di dalamnya. Kekosongan hukum ini karena pihak telegram terdaftar sebagai PSE Asing dalam lingkup privat di Indonesia. Pengguna pada telegram umumnya tidak teridentifikasi sehingga sulit untuk menuntut pelanggar secara hukum. Dampak dari kekosongan hukum ini yaitu industri film mengalami penghambatan, karena pencipta film tidak mendapatkan intensif yang cukup untuk terus berkarya. Pemerintah perlu menciptakan atau mengembangkan teknologi khusus anti-pembajakan yang efektif untuk mencegah pembajakan film di *platform* digital seperti telegram. Kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, pihak telegram dan para pencipta karya film sangat diperlukan untuk menciptakan digital yang kondusif serta dapat menghargai hak cipta karya orang lain (Sya'bani et al., 2024).

Menurut Satjipo Rahardjo dalam Sakti dan Budhisulistiyawati (2020), perlindungan hukum yaitu pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum dengan maksud perlindungan hukum yaitu upaya yang diberikan (Maulidania, 2024) oleh aparat penegak hukum dalam memberikan rasa aman baik pikiran ataupun fisik dari gangguan serta ancaman dari pihak lain (Welson & Deli, 2023). Teori ini apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap Film Gadis Kretek yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, bahwa mengenai perlindungan suatu karya film sudah diatur di dalam undang-undang, akan tetapi para pencipta belum merasa aman dengan adanya undang-undang ini karena masih banyak karyanya yang dibajak ataupun

disebarluaskan saat ini di aplikasi Telegram. Ketidaktegasan dari pihak Telegram terkait penyebaran film ini memberikan dampak negatif seperti para konten kreatif tidak mendapatkan hak ekonomi dari karyanya. Hukum untuk perlindungan terhadap hak ataupun ciptaan sinematografi serta kedudukannya sebagai pencipta belum dilaksanakan dengan baik. Sehingga hukum yang berlaku mengenai hak cipta seharusnya lebih ditingkatkan kembali dalam melindungi pencipta maupun ciptaannya. (HAFIIZH et al., 2021)

Simpulan

Pembajakan karya sinematografi sering dilakukan pada *platform* media sosial, terutama pada *platform* telegram. Telegram menjadi *platform* yang sangat populer untuk menyebarkan film bajakan. Salah satu contohnya yaitu Film Gadis Kretek yang di produksi Oleh BASE Entertainment dan FourcolourFilm. Film ini disebarluaskan pada grup Telegram dengan nama Lk21 dan rebahin.net. Pemegang hak cipta perlu dilindungi dengan adanya perlindungan hukum preventif dan respresif dari pelanggaran hak cipta penyebaran film pada telegram yang berjudul Film Gadis Kretek. Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu penutupan konten dan/hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik, sedangkan Upaya Respresif yaitu bentuk perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang lebih ditunjukkan apabila telah terjadi penyelesaian sengketa. Pihak Telegram dapat dituntut dengan kualifikasi turut serta dalam tindak pidana jika terbukti secara hukum bahwa telegram telah membiarkan atau tidak mengambil tindakan untuk mencegah atau menghentikan tindak pidana tersebut. Kominfo perlu memberikan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak cipta di *platform* digital terkait telegram yang belum terdaftar badan hukum di Indonesia. Adanya suatu kekosongan hukum pada pelanggaran hak cipta, dikarenakan belum ada undang-undang yang mengatur didalamnya. Kekosongan hukum ini terjadi karena telegram terdaftar sebagai PSE di Indonesia atau dalam lingkup privat, sehingga sulit untuk tunduk pada hukum dan peraturan Indonesia. Serta pengguna pada telegram umumnya tidak terindektasi, sehingga sulit untuk menuntut pelanggar secara hukum. Dampak dari

kekosongan hukum ini Industri film terhambat karena pencipta film tidak mendapatkan intensif yang cukup untuk terus berkarya.

Daftar Pustaka

- Afdhaniar, M. S. (2021). PENGARUH TRAVELLING RANS ENTERTAINMENT SEBAGAI KONTEN YOUTUBE TERHADAP MOTIVASI WISATA MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi (e-ISSN: 2807* <https://aksiologi.org/index.php/relasi/article/view/130>
- Ajibulloh, A. A., & Yudhistira, N. (2024). Memahami Format Iklan di Dalam Video Games. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi* <http://wartaiski.or.id/index.php/WartaISKI/article/view/271>
- Alfalah, A., & Anshori, D. S. (2020). Fenomena Kaba sebagai Sastra Lisan dan Praktik Alih Wahana: Tinjauan Sosiologi Sastra. *Seminar Internasional Riksa Bahasa.* <http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1394>
- Anjani, H. D., & Yusuf, A. B. (2022). Lakon Komedi Televisi "Lapor Pak!" di Trans7 (Kajian Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk). *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan* <https://e-journal.my.id/onoma/article/view/1846>
- Aziz, B. I. W. (2021). PEMBELAJARAN FOTOGRAFI BAGI GURU DAN MURID SD UNGGULAN BTN PEMDA MAKASSAR MELALUI PRODUKSI FILM PENDEK. *Indonesian Journal Of Community Service.* <http://ijocs.rcipublisher.org/index.php/ijocs/article/view/37>
- Darman, N., Rohana, R., & Pada, A. (2024). Pengaruh Penggunaan Media Video Animasi Terhadap Keterampilan Menyimak Cerita Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. *Didactica: Jurnal Kajian* <https://journal.actual-insight.com/index.php/didactica/article/view/2170>
- Darmawan, A. R. (2019). Papuan batik dissemination through documentary videos (case study on Phokouw Faa Batik Center). *Visualita.* <https://www.neliti.com/publications/546562/papuan-batik-dissemination-through-documentary-videos-case-study-on-phokouw-faa>
- Diajukan, S., Salah, M., & Persyaratan, S. (n.d.). *PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA SITUS FREE DOWNLOAD LAGU.*
- Flayembun, C., Datu, J. F., & Goa, L. (2022). Penguatan Iman Anak Biak Melalui Media Audio Visual Paroki Ratu Pecinta Damai Surabaya. *In Theos: Jurnal* <https://journal.actual-insight.com/index.php/intheos/article/view/1220>
- Habibie, A. F., Sahfitri, F. N., & ... (2023). Media pembelajaran interaktif "Batik Pedia" berbasis aplikasi android pada ensiklopedia Batik Nusantara. ... *Informasi Dan Sistem* <http://ejurnal.lkpkaryaprima.id/index.php/juktisi/article/view/75>
- HAFIIZH, M., Susilowati, R., & Yusa, M. Y. (2021). *DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN MELALUI KOREA-INDONESIA FILM FESTIVAL (KIFF).* repository.unsri.ac.id. <https://repository.unsri.ac.id/53945>

- Handayani, M., Abdullah, A., & ... (2022). Animasi 2 Dimensi Frame by Frame untuk Edukasi Protokol Kesehatan Covid-19 kepada Masyarakat. *Abdifomatika: Jurnal* <http://www.abdifomatika.org/index.php/home/article/view/166>
- Hartanto, E. A., & Tumimomor, A. Y. M. (2024). STRATEGI KREATIF MENARIK WISATAWAN DENGAN VISUALISASI POTENSI DESA WISATA MELALUI VIDEO PROMOSI. *IT-Explore: Jurnal Penerapan* <https://ejournal.uksw.edu/itexplore/article/view/12274>
- Hukum, P., Pihak, P., Tcefortin, S., Sakti, I., & Budhisulistiyawati, A. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH LETTER C DI BAWAH TANGAN. In *Jurnal Privat Law* (Vol. 1, Issue 2020).
- Islamiah, N. (2023). *Representasi Peran Public Relations dalam Drama Korea Shooting Stars= Representation of Role Public Relations in Shooting Stars Korean Drama.* repository.unhas.ac.id. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31154/>
- Lestari, I. A., Damayanti, L. A., Azzami, F., & ... (2023). Digital Dissemination of Waste Management Smart Building as a Sustainable Solution for Waste Management. *Mattawang: Jurnal* <https://sainsmat.org/index.php/mattawang/article/view/1913>
- Mandonza, M. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sikap Beriman Umat Lingkungan dalam Misa Online. In *Theos: Jurnal Pendidikan Dan Theologi.* <https://journal.actual-insight.com/index.php/intheos/article/view/1288>
- Maulidania, D. N. (2024). Struktur Kepribadian Pada Realitas Kampanye Politik Pemilihan Osis Dalam Film Carnivale. *Action Research Literate.* <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/246>
- Misbah, S. (2024). Analisis Manajemen Dakwah Kiyai Ahmad Dahlan Dalam Film Sang Pencerah. *Journal of Communication and Social Sciences.* <http://jurnal.dokicti.org/index.php/JCSS/article/view/420>
- Nuryanah, N., Zakiah, L., Fahrurrozi, F., & Hasanah, U. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Webtoon untuk Menanamkan Sikap Toleransi Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu.* <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/1244>
- Nuryaningsih, A. N. (2023). Strategi Komunikasi Politik melalui Platform TikTok untuk Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilu Tahun 2024. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan* <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/2050>
- Pamungkas, F. W. (2023). Peran Promosi Online Coffee Shop Yutabar Dalam Meningkatkan Penjualan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal* <https://www.yrpioku.com/journal/index.php/msej/article/view/3013>
- Putra, D., & Hartati, E. (2023). Pelatihan Filmora Dalam Pembuatan Materi Ajar Yang Kreatif Guru Sma Nurul Iman Palembang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin* <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpmasdi/article/view/2480>
- Rastati, R. (2022). A multimodal text analysis of K-Pop fans representation on Indonesia film television. *Jurnal Komunikasi Global.* <https://jurnal.usk.ac.id/JKG/article/view/24788>
- Ritonga, M., Hasibuan, S., Samosir, S. A., & ... (2023). Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Kajian Islam* <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/405>

- Sabillah, H. A. (2022). *The Role of The Production Team for Live Streaming of BRI League 1 Sports Broadcast on Vidio.com.* journal.neolectura.com. <https://journal.neolectura.com/index.php/propaganda/article/view/751>
- Salsabila, N., & Diera, G. A. (2022). Advokasi Media Sosial Yayasan Jurnal Perempuan: Upaya Penyebaran Wacana Feminisme di Era Digital. *Jurnal Perempuan*. <http://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/701>
- Setyorini, N., Sholeh, K., Santoso, S. D., & ... (2023). Pelatihan pembuatan media ajar quiziz dan komic digital dengan aplikasi comic life 3/5/15 full version bagi guru paud, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. *JPM: Jurnal Pengabdian* <http://djournals.com/jpm/article/view/955>
- Sya'bani, M. H., Razzaq, A., & ... (2024). Analisis Pesan Dakwah pada Media Sosial Podcast Login Habib Ja'far dan Onad. ... *Social Sciences and* <https://digital-science.pubmedia.id/index.php/pssh/article/view/170>
- Welson, W., & Deli, D. (2023). Studi Eksplorasi Perbandingan Fotografi Smartphone Menggunakan Metode Blind Test. *Hello World Jurnal Ilmu Komputer*. https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/hello_world/article/view/182
- Yuba, M. Z. P. (2022). *Pemanfaatan Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Fotografi Produk Menggunakan Smartphone Pada Akun TikTok@ NASIONP.* eprints.ubhara.ac.id. <http://eprints.ubhara.ac.id/1572/>